

# PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DI BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK YOGYAKARTA

## COMPETENCY-BASED CURRICULUM DEVELOPMENT TRAINING IN YOGYAKARTA TECHNICAL EDUCATION TRAINING CENTERS

Oleh: Rustam Ali Sodiqin, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, FIP, UNY  
rustamalis1996@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pengembangan kurikulum diklat berbasis kompetensi di BLPT Yogyakarta beserta faktor pendukung dan penghambat proses pengembangan kurikulum di BLPT Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di BLPT Yogyakarta dengan subjek penelitian meliputi 2 instruktur, 2 penyelenggara diklat, dan 4 peserta diklat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Prosedur pengembangan kurikulum diklat di BLPT Yogyakarta meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Penyusunan kurikulum/silabus diklat dilakukan oleh instruktur bersama dengan DUDI dan guru SMK berdasarkan SKKNI, kebutuhan industri, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. (2) Faktor pendukung proses pengembangan kurikulum diklat antara lain; melibatkan DUDI, Praktisi Pendidikan dan instruktur internal BLPT, dan adanya dukungan dari lembaga penyelenggara diklat. (3) Faktor penghambat proses pengembangan kurikulum diklat antara lain; sulit menghubungi *stakeholder* terkait, perubahan kebijakan, SDM terbatas, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antara instruktur dan penyelenggara diklat.

Kata kunci: Pengembangan Kurikulum, Kurikulum Diklat, BLPT Yogyakarta

### Abstract

*This study aims to determine and describe procedures for developing a competency-based curriculum training at BLPT Yogyakarta with supporting and inhibiting factors in the process of curriculum development in BLPT Yogyakarta. The research method used is a qualitative approach to the type of descriptive research. This research was conducted at BLPT Yogyakarta with research subjects including 2 instructors, 2 training providers, and 4 training participants. Data collection techniques using observation, interviews and document studies. Data analysis techniques used include data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Test the validity of the data using source and technique triangulation. The results of the study show the following. (1) Procedures for curriculum development training in BLPT Yogyakarta include planning, implementation, and evaluation. The preparation of the curriculum / syllabus of training is carried out by the instructor together with DUDI and vocational teachers based on the SKKNI, industry needs, and the curriculum set by the government. (2) Supporting factors for the curriculum development process include; involving DUDI, Education Practitioners and BLPT internal instructors, and the existence of support from education and training providers. (3) Factors inhibiting the process of curriculum development training include; difficulty in contacting relevant stakeholders, policy changes, limited human resources, budget constraints, lack of coordination between instructors and training providers.*

Keywords: Curriculum Development, Training Curriculum, BLPT Yogyakarta

## PENDAHULUAN

Guru menjadi komponen penting yang memiliki peran utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya secara formal. Guru seringkali dianggap sebagai ujung tombak dalam menentukan keberhasilan peserta didik dalam konteks proses belajar mengajar. Sehingga

peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan dan tercantum dalam kurikulum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari peran guru.

Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 2 menyebut guru sebagai tenaga profesional pada

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Tuntutan profesionalitas guru berlaku disetiap jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal. Termasuk didalamnya guru SMK yang dituntut untuk membekali siswanya memiliki keahlian khusus agar menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri yang siap digunakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 yang menyebutkan bahwa “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu”.

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk selalu meningkatkan kompetensi guru SMK melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 14 tentang Hak dan Kewajiban yang menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Akan tetapi fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, lulusan SMK yang digadang-gadang memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia pekerjaan maupun dunia industri justru termasuk penyumbang pengangguran paling banyak di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Keadaan

Ketenagakerjaan Indonesia pada Periode Agustus 2018 yang diterbitkan dalam laporan No. 92/11/Th.XXI, 05 November 2018 dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lainnya dengan prosentase sebesar 11,24 persen.

Melihat kondisi tersebut, sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi dan pemerintah harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi ke arah demand driven (kebutuhan dunia kerja). Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM (BSN, 17 mei 2017). Inpres tersebut bertujuan untuk membuat peta jalan bagi pengembangan SMK, termasuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum dengan kompetensi sesuai dengan pengguna lulusan (*link and match*).

Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT Daerah) di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 disebutkan bahwa tugas pokok BLPT Yogyakarta adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan keteknikan. Fungsi BLPT Yogyakarta salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) meliputi Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi guru dan siswa SMK se-

Yogyakarta, Pendidikan dan Pelatihan life skill SLB se-Yogyakarta, Pendidikan dan Pelatihan paket C kejuruan, dan Skill Contest Guru SMK.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi bagi guru SMK se-Yogyakarta merupakan salah satu program diklat teknis yang diselenggarakan BLPT Yogyakarta dengan tujuan untuk memberikan peluang bagi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya. Salah satunya adalah diklat sistem bahan bakar EFI (*Electronic fuel injection*) dari Jurusan Otomotif. Diklat sistem bahan bakar EFI diselenggarakan dalam rangka meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan memiliki daya saing di dalam maupun di luar negeri pada bidang otomotif (blptjogja: 2019).

Keberhasilan pendidikan dan pelatihan (diklat) dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kurikulum. Kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan diklat. Hal ini disebabkan kurikulum mempunyai posisi dan pengaruh yang strategis dalam keseluruhan proses dan hasil diklat. Seperti yang diungkapkan oleh Hamalik (2004: 280) bahwa kurikulum adalah alat yang amat penting dalam rangka merealisasikan dan mencapai tujuan pendidikan dan latihan.

Kurikulum merupakan instrumental input yang membantu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan. Namun, ketercapaian kompetensi diklat tidak hanya ditentukan kualitas kurikulum dan silabus, akan tetapi ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan mulai dari penyiapan sarana prasarana, peserta diklat, penyiapan

instruktur maupun implementasinya melalui proses pembelajaran.

Penting bagi BLPT Yogyakarta melakukan kajian komprehensif terhadap seluruh proses penyelenggaraan diklat teknis. Hal ini untuk memastikan bahwa kurikulum yang telah dirancang sebelumnya dapat diimplementasikan sesuai arahan, SOP, pedoman penyelenggaraan, petunjuk, serta tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 bahwa Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi untuk diklat teknis bersifat sangat spesifik, karena berupaya untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang terus berkembang untuk pelaksanaan tugas guru.

Walaupun demikian, pada kenyataannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan diklat di BLPT Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi diklat tahun 2018 yang menunjukkan bahwa diklat peningkatan kompetensi guru SMK di BLPT Yogyakarta belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama kegiatan diklat peningkatan kompetensi guru SMK di BLPT Yogyakarta adalah sebagai berikut; masih adanya peserta diklat yang tidak memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan; jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta, sehingga masih ada beberapa peserta diklat yang meninggalkan pelatihan untuk mengurus kegiatan lainnya; kurangnya kelengkapan dokumen hasil penilaian peserta diklat; dan belum adanya tindak lanjut dari

pihak BLPT untuk monitoring penerapan hasil diklat oleh peserta di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan instruktur internal BLPT Yogyakarta diperoleh data bahwa rancangan kurikulum berbasis kompetensi yang di implementasikan pada diklat peningkatan kompetensi guru SMK belum terlaksana dengan baik sehingga hasilnya pun belum maksimal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana prosedur pengembangan kurikulum diklat berbasis kompetensi di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta beserta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan kurikulumnya.

### **Kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi**

Kata *curriculum* berasal dari bahasa Yunani “*curir*”, artinya pelari dan “*currere*” atau artinya tempat berpacu. Maknanya *curriculum* adalah jarak yang harus ditempuh pelari untuk sampai finish yang ditetapkan (Sudjana, 1989: 02).

Sukmadinata (2009: 27) secara menyeluruh menjelaskan ada 3 konsep mengenai kurikulum, yaitu; (1) pengertian kurikulum sebagai substansi artinya suatu rencana kegiatan belajar atau tujuan yang ingin dicapai. (2) kurikulum sebagai suatu sistem artinya merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan bahkan sistem masyarakat. (2) kurikulum sebagai bidang studi bertujuan mengembangkan ilmu tentang kurikulum.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum sebenarnya dapat

diklasifikasikan menjadi 2, yaitu; (1). Sebagai program, rencana ataupun harapan (ideal) dan (2). Sebagai pengalaman belajar, hasil belajar, batasan isi, kegiatan, sistem penilaian dan pengelolaan lingkungan belajar (actual). Kurikulum bersifat ideal biasanya dituangkan ke dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)/Garis Besar Mata Diklat (GBMD), silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan bentuk perencanaan lain. Bersifat actual kurikulum merupakan implementasi dari yang direncanakan dalam bentuk pengalaman belajar yaitu berupa kegiatan nyata pembelajaran.

Saylor (1981), menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai “... *a design based on specific competencies is characterized by specific, sequential, and demonstrable learning of the task, activities, or skill which constitute the acts to be learned and performed by student*”. Desain kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada kompetensi spesifik yang ditandai dengan pembelajaran yang spesifik, berurutan, dan dilakukan melalui tugas, kegiatan, atau keterampilan yang harus dipelajari dan dilakukan oleh peserta didik (Ghufron: 2017: 3).

### **Komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Menurut Ghufron (2017: 31), ada beberapa komponen dalam model desain kurikulum berbasis kompetensi, sebagai berikut. (a) Tujuan yang diinginkan dengan desain kurikulum ini adalah mengharapkan peserta pelatihan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan di masyarakat, dunia kerja, dan dunia usaha. (b) Materi pelatihan/diklat dikembangkan dan diorganisir mengacu pada spektrum jabatan atau pekerjaan tertentu dan biasanya dikemas dalam bentuk

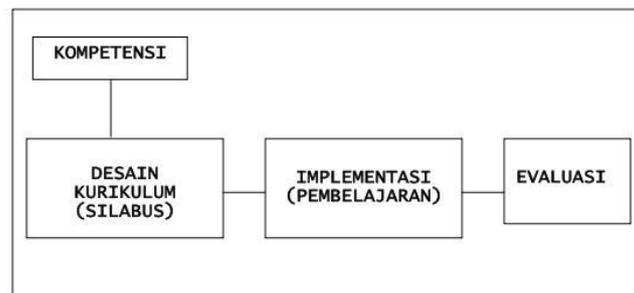
bagian-bagian atau blok. (c) Proses pembelajaran berpusat pada peserta pelatihan, yang menekankan pada pembelajaran individual dan ketuntasan. Peserta pelatihan wajib melaksanakan tugas-tugas yang menjadi beban belajarnya secara individual dan mencapai ketuntasan materi yang dipersyaratkan.

Sedangkan menurut Hamalik (2017: 24-30) komponen kurikulum tersebut meliputi; tujuan, materi kurikulum, metode, organisasi kurikulum, dan evaluasi.

### **Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Sukmadinata (2004: 47) mengemukakan bahwa kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan dan merupakan bidang yang langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan dan pelatihan. Pada proses pengembangan kurikulum, minimal dapat dibedakan antara desain kurikulum atau kurikulum tertulis (*design, written, ideal, intended, official, formal curriculum*) dan implementasi kurikulum atau kurikulum perbuatan (*curriculum implementation, actual curriculum, real curriculum, atau curriculum in action*).

Sementara itu, mengacu pada pendapat Print (1993) dalam Ghufron (2004: 4) yang mengartikan pengembangan kurikulum sebagai “... *the process of planning, implementing, and evaluating learning opportunities intended to produce desired changes in learners*”, maka kegiatan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memiliki tiga tahap, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Visualisasi dari kegiatan pengembangan kurikulum seperti pada gambar dibawah sebagai berikut.



Gambar 1. Model Pengembangan Kurikulum (Adaptasi dari Saylor, 1981)

#### **1. Perencanaan**

Menurut Madjid (2017: 15) tahap perencanaan adalah untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kebijakan berdasarkan jadwal sehari-hari.

Disisi lain, lebih spesifik lagi Hamalik (2009: 249) mengungkapkan bahwa perencanaan bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Tahap perencanaan berupa penetapan komponen seperti pemilihan metode, sarana prasarana yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, personalia yang terlibat, anggaran yang dibutuhkan, dan sistem evaluasi yang akan digunakan. Hasil nyata dari tahap perencanaan ini adalah *blue print* (cetak biru) yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dalam diklat atau sering disebut dengan perencanaan diklat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Proses Pendidikan dan Pelatihan bahwa perencanaan proses diklat meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan diklat yang didalamnya memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar, serta penyusunan personalia yang terlibat dalam program diklat tersebut.

## 2. Implementasi

Implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Hasan (2000: 1) mengatakan "... jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan maka dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis".

Setidaknya ada dua persoalan pokok dalam mengimplementasikan kurikulum, yaitu persoalan yang berhubungan dengan kurikulum apa yang digunakan dalam pelatihan tersebut, dan persoalan yang berhubungan dengan kemampuan instruktur/widyaiswara untuk melaksanakannya. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan kedua ditegaskan oleh Sukmadinata (1988: 218) dengan mengatakan bahwa implementasi kurikulum hampir seluruhnya tergantung pada kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan pengajar yang dalam hal ini adalah instruktur/widyaiswara.

## 3. Evaluasi

Sukmadinata (2004: 74) mengatakan bahwa selama implementasi kurikulum, pada prinsipnya dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengetahui kelemahan, kekurangan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi kurikulum berbeda dengan evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini lingkupnya lebih luas, yaitu mengevaluasi proses pelaksanaan kurikulum, proses dan hasil belajar, mengevaluasi faktor-faktor pendukung seperti instruktur, sarana dan

prasarana, fasilitas pembelajaran, media dan sumber belajar, serta desain kurikulumnya itu sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa, evaluasi dalam pengembangan kurikulum meliputi evaluasi kurikulum, mengevaluasi desain, proses pelaksanaan kurikulum, proses dan hasil belajar, serta semua komponen sumber daya pelatihan/diklat. Hasil-hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan kurikulum, baik penyempurnaan desain, implementasi, faktor pendukung maupun evaluasinya sendiri.

## Konsep Pendidikan dan Pelatihan

Pengertian Pendidikan dan Pelatihan merupakan bagian yang tak terpisahkan, karena sering kali disebut dengan istilah diklat (pendidikan dan pelatihan). Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan yang secara luas dilaksanakan tidak hanya di perusahaan swasta, tetapi juga lembaga pendidikan, pemerintahan, hingga organisasi nonprofit lainnya. Noe (2010: 5) mengemukakan bahwa "*Training refers to a planned effort by a company to facilitate employees' learning of job related competencies*" yang kurang lebih artinya "pelatihan merupakan sebuah usaha terencana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait kompetensi pekerjaan".

Oemar Hamalik (2007: 10) mengemukakan bahwa pelatihan merupakan sebuah proses yang meliputi serangkaian upaya yang dilakukan oleh tenaga profesional dalam satuan waktu, untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan peserta dalam bidang pekerjaan

tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.

Pelatihan merupakan kegiatan yang secara sengaja dirancang dan diorganisir dengan tujuan untuk menanamkan informasi dan atau instruksi untuk meningkatkan kinerja dari penerima atau peserta untuk membantunya mencapai tingkat pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan.

### **Tujuan Pendidikan dan Latihan**

Menurut Anwar (2006: 166) tujuan pelatihan adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari para karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Pendidikan dan latihan (diklat) pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan diturunkan dari hasil pengkajian kebutuhan diklat berdasarkan kebutuhan yang ada dilapangan atau kesenjangan yang ada. Pendidikan dan latihan (diklat) pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan diturunkan dari hasil pengkajian kebutuhan diklat berdasarkan kebutuhan yang ada dilapangan atau kesenjangan yang ada.

### **Diklat Teknis Berbasis Kompetensi**

Diklat teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Diklat teknis diselenggarakan dengan tujuan untuk; (1) meningkatkan pengetahuan,

keahlian, keterampilan sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika yang sesuai dengan kompetensi teknis jabatannya. (2) memantapkan sikap, perilaku dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat (Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 7).

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kurikulum**

Menurut Sukmadinata (2002: 155) dalam mengembangkan suatu kurikulum banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu: administrator pendidikan dan latihan, ahli pendidikan dan latihan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, instruktur, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak-pihak tersebut yang secara terus menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah: administrator, instruktur, dan ahli kurikulum.

**Faktor pendukung proses pengembangan kurikulum.** Ada beberapa faktor pendukung dalam proses pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2002:155-157) diantaranya sebagai berikut. (1) Peranan para administrator; Para administrator ini terdiri atas: direktur bidang pendidikan/pelatihan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, dan kepala lembaga. Peranan para administrator di tingkat pusat (direktur dan kepala pusat) dalam mengembangkan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta inti kurikulum.

(2) Peranan para ahli; Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan

tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan dan pelatihan, ahli kurikulum, maupun ahli di bidang studi/disiplin ilmu.

(3) Instruktur; Instruktur memegang peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Instruktur adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Karena instruktur merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan, maka instruktur pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum.

Peran instruktur bukan hanya menilai hasil belajar peserta diklat, melainkan juga menilai implementasi kurikulum dalam lingkup yang lebih luas. Hasil-hasil penilaian itu dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum dan juga dapat membantu mencari cara untuk mengoptimalkan kegiatan instruktur.

**Faktor penghambat proses pengembangan kurikulum.** Menurut Sukmadinata (2002: 155) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pengembangan kurikulum. Faktor tersebut diantaranya adalah instruktur, penyelenggara diklat, dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi faktor pendukung ataupun penghambat, tergantung bagaimana cara memanfaatkannya. Adapun menurut Siregar (2018: 157-164) faktor penghambat dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut.

(1) Kurangnya dukungan dari penyelenggara diklat. (2) Kurangnya kompetensi atau keahlian instruktur dalam menyusun kurikulum/silabus diklat. (3) Kurangnya pembiayaan (dana) yang dianggarkan dalam perencanaan penyelenggaraan suatu diklat. (4) Sarana prasarana, peralatan diklat dan fasilitas yang tidak mendukung.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2015: 100) menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta. Penelitian dilakukan dari tanggal 15 Juli-20Agustus 2019.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pengembangan kurikulum diantaranya penyelenggara diklat dan instruktur. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Program dan Evaluasi, penyelenggara diklat, instruktur, dan peserta diklat. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Program dan Evaluasi dan instruktur internal maupun eksternal yang terlibat dalam penyusunan kurikulum/silabus di BLPT Yogyakarta.

## **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2019), ada tiga langkah dalam melakukan analisis data yaitu sebagai berikut; kondensasi data (*data condensation*), display data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga langkah tersebut dilakukan bersamaan setelah sebelumnya peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data.

## **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil observasi, studi dokumen serta wawancara dengan informan yaitu instruktur, penyelenggara diklat dan peserta diklat di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta. Sedangkan triangulasi teknik, peneliti melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk mengetahui bagaimana prosedur pengembangan kurikulum diklat berbasis kompetensi di BLPT Yogyakarta.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ada 3 situasi yang mendasari atau mendorong BLPT Yogyakarta dalam menyusun kurikulum/silabus diklat, sebagai berikut. (1) BLPT Yogyakarta menyusun kurikulum diklat sebagai bagian dari program rutin yang masuk dalam DPA SKPD. (2) Selama menjalankan program diklat yang tertuang dalam DPA, sering harus menerima atau merespon permintaan diselenggarakannya jenis diklat tertentu yang substansinya baru dan harus dilakukan pada tahun yang sama, bahkan di bulan tertentu tahun yang sama sesuai permintaan. (3) BLPT Yogyakarta memiliki kesempatan untuk merancang, menyusun, dan mengembangkan kurikulum diklat untuk pelaksanaan tahun depan

## **Prosedur Pengembangan Kurikulum Diklat**

Hasil kajian mengenai prosedur pengembangan kurikulum/silabus berbasis kompetensi dalam diklat teknis dilihat dari proses penyusunan dan isinya dirumuskan berdasarkan tahapan model pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dikemukakan oleh Ghufron (2004: 5) dengan mengadaptasi model dari Saylor, Alexander dan Lewis (1982) yaitu meliputi tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

### **1) Perencanaan**

Tahap perencanaan berupa penetapan komponen seperti pemilihan metode, sarana prasarana yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, personalia yang terlibat, anggaran yang dibutuhkan, dan sistem evaluasi yang akan digunakan. Hasil nyata dari tahap perencanaan ini adalah *blue print* (cetak biru). Rencana yang telah disusun tersebut dijadikan sebagai acuan bagi instruktur/pelaksana teknis untuk memfasilitasi

peserta dalam setiap program diklat yang diselenggarakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Proses Pendidikan dan Pelatihan pada point Perencanaan Proses Pembelajaran yang didalamnya memuat: (1) penyusunan silabus; (2) rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar; dan (3) penentuan personalia yang meliputi instruktur dan peserta diklat.

**Penyusunan silabus.** Penyusunan silabus diklat di BLPT Yogyakarta dilakukan pada saat kegiatan sinkronisasi dan penyusunan silabi diklat yang diselenggarakan bagian Seksi Program dan Evaluasi pada akhir tahun. Kegiatan ini dilakukan diakhir tahun dengan mengundang *stakeholder* terkait seperti instruktur internal BLPT Yogyakarta dan instruktur eksternal (DUDI, guru-guru SMK atau Dosen yang sesuai dengan jurusan masing-masing).

Penyusunan silabus diklat disesuaikan dengan kebutuhan industri, kurikulum yang ditetapkan pemerintah atau berlaku disekolah, kebutuhan masyarakat dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Penyusunan silabus diklat di BLPT Yogyakarta sesuai dengan Permen Kemenakertrans Nomor 8 Tahun 2014 bahwa acuan dasar dalam mengembangkan program diklat berbasis kompetensi menggunakan standar kompetensi kerja salah satunya adalah SKKNI.

Pada bagian penyusunan silabus diklat ini, yang menjadi catatan penting adalah penyusunan

silabus diklat yang seharusnya dilakukan oleh bagian penyelenggara diklat, justru dilakukan oleh instruktur seluruhnya, dari proses awal perumusan diklat hingga pelaksanaan dan pelaporan semua ditanggung oleh instruktur, sehingga beban kerja yang diterima oleh instruktur menjadi lebih banyak. Hal ini berdampak pada sebagian besar instruktur tidak dapat menyiapkan RPP dengan baik, bahkan ada yang sama sekali tidak membuat RPP dengan alasan sudah terlalu “sibuk” dan tidak ada waktu untuk membuatnya. Sehingga penyusunan RPP menjadi masing-masing kebutuhan bagi instruktur, padahal menurut penuturan Kepala Seksi Program dan Evaluasi, bahwa RPP itu wajib ada dan sebelum kegiatan diklat dimulai ada ceklis kelengkapan diklat yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah RPP.

Penyusunan RPP. Penyusunan RPP disesuaikan dengan silabus dan SKKNI. RPP disusun oleh instruktur yang bekerjasama dengan DUDI. Penyusunan RPP dilakukan satu paket bersamaan dengan pembuatan silabus, modul, dan jobsheet atau perangkat diklat lainnya. Akan tetapi tidak semua instruktur melaksanakan kegiatan penyusunan RPP atau lesson plan, karena selama ini belum ada kewajiban terhadap instruktur untuk menyusun RPP. Faktor kesibukan dan bertambahnya beban kerja menjadi alasan utama mengapa instruktur tidak menyusun RPP.

Hal itu dikarenakan Seksi Program dan Evaluasi yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap penyusunan silabus diklat tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tugas penyusunan silabus diklat seluruhnya dilimpahkan ke instruktur. Disamping itu alasan lain kenapa instruktur tidak membuat

RPP adalah mereka sudah tahu apa saja yang harus disampaikan dan tugas-tugas apa saja yang harus diberikan untuk peserta diklat dengan mengikuti jadwal diklat per sesi di setiap materi diklat.

**Penentuan Peserta Diklat.** Penentuan peserta diklat dilakukan melalui proses rekrutmen. Secara keseluruhan proses rekrutmen yang dilakukan adalah dengan: (1) menyebarkan informasi tentang program diklat yang akan dilaksanakan dan persyaratannya, (2) melakukan pendaftaran calon peserta, (3) menyiapkan daftar rekapitulasi calon peserta, (4) menetapkan metode seleksi, (5) melakukan seleksi, (6) menetapkan hasil seleksi, (7) mengumumkan hasil seleksi, (8) menyiapkan daftar peserta yang telah dinyatakan diterima, (9) dan membuat data lengkap peserta pelatihan.

Penyebaran informasi diklat berbasis kompetensi di BLPT Yogyakarta melalui sosialisasi/*roadshow*, website BLPT, mengirim WA ke kepala sekolah, dan surat pemanggilan peserta diklat ke sekolah. Pemanggilan peserta dilakukan oleh Seksi Layanan BLPT Yogyakarta berdasarkan data-data sekolah yang diperoleh dari Dikmen dari masing-masing kabupaten di DIY yang memiliki jurusan sesuai dengan program diklat yang akan diselenggarakan. Persyaratan atau kriteria yang harus dimiliki oleh peserta diklat ditentukan oleh Seksi Layanan yang tercantum dalam rencana program diklat.

### **Penentuan Instruktur.**

Penentuan instruktur disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan BLPT Yogyakarta atau sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi/ahli dibidangnya yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah atau sertifikat keahlian.

Penentuan instruktur di BLPT Yogyakarta sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di didalam Permen Kemenakertrans Nomor 8 Tahun 2014 yaitu, memiliki kompetensi metodologi dan kompetensi teknis, mendapat surat penugasan dari Kepala Lembaga Pelatihan melalui surat penugasan, dan terdiri dari instruktur, PSM, tenaga ahli, atau istilah lain yang setara dengan itu. Lembaga pelatihan dapat mendatangkan atau memanfaatkan tenaga pelatih yang berasal dari luar seperti industri atau perusahaan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

## **2) Implementasi**

Implementasi merupakan perwujudan dari apa yang sudah direncanakan dalam silabus diklat maupun RPP yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di kelas yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup oleh instruktur diklat.

**Kegiatan Pendahuluan.** Kegiatan pendahuluan yang dilakukan instruktur saat diklat sistem bahan bakar EFI adalah mengecek daftar hadir, membagikan soal *pre-test* kepada peserta diklat untuk mengukur kemampuan awal mereka dan diskusi mengenai usulan program atau perbaikan bagi BLPT Yogyakarta. Hal ini dikarenakan pada hari pertama diklat berlangsung ada pegawai yang meninggalnya dunia, sehingga kegiatan pembukaan diklat yang seharusnya dibuka oleh Kepala BLPT Yogyakarta ataupun Kepala Seksi yang bisa mewakili tidak dapat dilangsungkan karena pergi melayat. Oleh karena itu jadwal dihari pertama hanya diisi dengan mengerjakan soal *pre-test* dan usulan program

kegiatan dari peserta diklat untuk BLPT kedepannya.

Pada kegiatan pendahuluan instruktur mengikuti prosedur yang ada berdasarkan Permen Kemenakertrans Nomor 8 Tahun 2014 bahwa tahapan pendahuluan (*introducing/preparation*) agar belajar terstruktur dapat efektif yaitu sebagai berikut; mengatur ruangan (kelas/bengkel), menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan waktu mengajar, menentukan bahan dan alat yang akan digunakan peserta pelatihan, menyiapkan alat bantu mengajar seperti proyektor, komputer, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan, menyiapkan evaluasi yang digunakan, mengecek kehadiran peserta pelatihan, memperkenalkan judul pelajaran, melakukan apersepsi, mengecek pengetahuan peserta pelatihan, dan menyampaikan tujuan belajar.

**Kegiatan Inti.** Pada kegiatan inti diklat sistem bahan bakar EFI di BLPT Yogyakarta dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahap penyajian materi dan tahap pengaplikasian/kegiatan praktik langsung di bengkel. Pada tahap penyajian materi/pembelajaran instruktur terlihat menguasai materi diklat dan dapat menyampaikan dengan baik kepada peserta diklat. Instruktur juga datang sesuai jadwal diklat yang telah disusun, media dan bahan ajar yang digunakan oleh instruktur berupa power point dan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi.

Penggunaan media dinilai sudah cukup efektif dan sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga memudahkan peserta dalam memahami materi yang diajarkan. Akan tetapi peserta diklat tidak diberikan materi/modul dalam bentuk cetak, sehingga mereka merasa

kesulitan jika harus membuka materi melalui laptop atau gadget.

Pengelolaan pembelajaran oleh instruktur di ruang kelas teori maupun pada saat praktik dinilai sudah cukup baik, komunikatif, interaktif dan menyenangkan. Akan tetapi tidak didukung dengan kelengkapan bahan diklat seperti job sheet dan modul, sehingga peserta sedikit mengalami kesulitan walaupun bisa di atasi dengan bertanya kepada instruktur maupun teman lainnya yang sudah paham.

Strategi diklat yang digunakan oleh instruktur bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Untuk kelas teori menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Kondisi atau suasana kelas sangat mendukung, pembelajaran berlangsung secara kondusif dan terjadi komunikasi dua arah yang baik dari peserta dan instruktur, peserta diklat terlihat antusias mengikuti kegiatan diklat, dan didukung dengan adanya fasilitas AC yang membuat suasana kelas menjadi nyaman.

Sedangkan untuk praktik, peserta diklat langsung mengaplikasikan sesuai job sheet yang dijelaskan oleh instruktur. Selama proses praktik berlangsung, instruktur melakukan kegiatan monitoring kepada peserta diklat dan menjawab semua pertanyaan apabila ada peserta yang masih belum paham sesuai job yang diberikan.

**Penutup.** Kegiatan penutup dalam diklat sistem bahan bakar EFI dilakukan oleh instruktur BLPT Yogyakarta kurang lebih sama, yaitu dengan merangkum materi diklat selama satu sesi, melakukan refleksi, dan memberikan kesempatan peserta diklat untuk memberikan respon (saran ataupun tanggapan) diakhir sesi pembelajaran.

### 3) Evaluasi

Evaluasi yang digunakan dalam program diklat sistem bahan bakar EFI meliputi evaluasi hasil belajar, evaluasi tenaga pengajar, dan ceklis kelengkapan diklat. Akan tetapi pada saat pelaksanaan diklat tidak sepenuhnya dilakukan. Tidak adanya evaluasi untuk proses pelaksanaan diklat dan evaluasi faktor-faktor pendukung seperti instruktur, sarana dan prasarana, fasilitas pembelajaran, media dan sumber belajar, serta desain kurikulumnya itu sendiri. Hal ini disebabkan kekurangan SDM, hal ini berdampak pada tugas dan beban kerja masing-masing panitia penyelenggara diklat di BLPT Yogyakarta menjadi berlipat ganda, sehingga mengakibatkan saling lempar tanggung jawab. Evaluasi yang benar-benar dilaksanakan hanya pada proses dan hasil belajar peserta diklat, yaitu melalui *pre test* dan *post test*.

#### **Faktor Pendukung Proses Pengembangan Kurikulum**

Faktor pendukung dalam proses pengembangan kurikulum/silabus diklat di BLPT Yogyakarta diantaranya adalah: (1) melibatkan DUDI, sehingga dapat diketahui apa yang dibutuhkan dunia industri pada saat ini; (2) melibatkan praktisi pendidikan yang memiliki kompetensi dibidangnya, sehingga dapat menghasilkan kurikulum/silabus diklat yang baik; (3) adanya komunikasi yang baik; (4) instruktur BLPT Yogyakarta yang sudah memiliki banyak pengalaman dan ahli dibidangnya; dan (5) adanya dukungan dari lembaga terkait pengembangan silabus dengan mengadakan kegiatan sinkronisasi kurikulum dan penyusunan silabus di akhir tahun.

Sementara itu faktor pendukung yang ada pada saat pelaksanaan diklat adalah tersedianya sarana prasarana yang mendukung, seperti asrama, alat dan bahan untuk praktik sudah terbaru dan bervariasi serta sudah terstandar walaupun dalam segi jumlah belum dapat memenuhi kebutuhan peserta diklat.

#### **Faktor Penghambat Proses Pengembangan Kurikulum**

Faktor penghambat dalam proses pengembangan kurikulum/silabus antara lain: (1) kesulitan dalam menghubungi DUDI maupun praktisi pendidikan dikarenakan kesibukan masing-masing; (2) sulit untuk mengumpulkan stakeholder terkait dalam satu forum diskusi dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan; (3) perubahan kebijakan, yang menyebabkan program diklat yang sudah disusun pada tahun sebelumnya harus berganti dengan program diklat lain dengan kebutuhan bahan dan alat yang berbeda; dan (4) penyusunan silabus yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara diklat (Seksi Program dan Evaluasi) dilimpahkan ke instruktur seluruhnya, sehingga kewajiban instruktur untuk menyusun RPP untuk mata diklat yang diampunya justru tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beban yang diterima instruktur semakin bertambah, sehingga instruktur tidak ada waktu untuk menyusunnya. Sehingga muncul pendapat bahwa, penyusunan RPP itu disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing instruktur. Jika instruktur sudah paham dan tahu urutan pembelajarannya, maka mereka merasa tidak perlu melakukan penyusunan RPP.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Prosedur pengembangan kurikulum diklat di BLPT Yogyakarta meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan meliputi penyusunan silabus, penyusunan RPP atau *Lesson Plan*, dan penentuan personalia yang meliputi instruktur dan peserta diklat. Pada tahap implementasi, hal yang dilakukan adalah menentukan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Sedangkan pada tahap perumusan evaluasi, hal yang dilakukan yaitu merumuskan evaluasi diklat untuk pelaksanaan diklat, evaluasi untuk instruktur, dan evaluasi hasil belajar untuk peserta diklat. Secara keseluruhan, proses penyusunan silabus dilakukan oleh instruktur internal BLPT yang bekerja sama dengan DUDI (Dunia Usaha/Dunia Industri atau Dosen dan Guru senior SMK. Penyelenggara diklat hanya berperan sebagai pemberi fasilitas untuk kegiatan sinkronisasi dan penyusunan silabus diklat di BLPT Yogyakarta.
- 2) Faktor Pendukung dalam proses pengembangan kurikulum/silabus diklat di BLPT Yogyakarta diantaranya adalah: (1) melibatkan DUDI; (2) melibatkan praktisi pendidikan yang memiliki kompetensi dibidangnya; (3) adanya komunikasi yang baik; (4) instruktur BLPT Yogyakarta yang sudah memiliki banyak pengalaman dan ahli dibidangnya; dan (5) adanya dukungan dari lembaga terkait pengembangan silabus.

- 3) Faktor Penghambat dalam proses pengembangan kurikulum/silabus diklat di BLPT Yogyakarta antara lain: (1) kesulitan dalam menghubungi DUDI maupun praktisi pendidikan; (2) sulit untuk mengumpulkan *stakeholder* terkait dalam satu forum diskusi dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan; (3) perubahan kebijakan; (4) keterbatasan SDM; (5) keterbatasan anggaran; (6) kurangnya koordinasi antara instruktur dengan penyelenggara diklat; dan (7) penyusunan silabus yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara diklat (Seksi Program dan Evaluasi) dilimpahkan ke instruktur seluruhnya, sehingga kewajiban instruktur untuk menyusun RPP, justru tidak dilakukan dikarenakan sudah terlalu “sibuk” dan tidak ada waktu untuk menyusunnya. Sehingga muncul pendapat bahwa, penyusunan RPP itu disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing instruktur.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

1. Terdapat beberapa kendala dalam penyusunan kurikulum/silabus diklat, salah satunya adalah kesulitan untuk menghubungi dan mengumpulkan *stakeholder* terkait. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk menambahkan cara baru yang lebih efektif misalnya melalui video *conference*, sehingga apabila ada salah satu anggota tim yang tidak bisa hadir mengikuti kegiatan sinkronisasi dan penyusunan

silabus, mereka tetap bisa memberikan kontribusi maksimal.

2. Mengingat instruktur untuk jurusan otomotif hanya ada 1 (satu) orang dan bukan pegawai tetap, maka dirasa sangat perlu untuk penambahan SDM atau dalam hal ini instruktur, sehingga tugas dan beban kerja yang dimiliki oleh instruktur dapat terselesaikan dengan baik.
3. Perlunya monitoring pelaksanaan diklat secara bertahap, karena masih ditemukan beberapa kekurangan kelengkapan diklat dilapangan. Sehingga peserta diklat mengalami sedikit kesulitan untuk memahami materi diklat yang diajarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Sumber Referensi Buku

- Bakar, R.M dan Jufri, M. (2017). *Analisis Kebutuhan dan Rancangan Pelatihan*. Yogyakarta: Ombak.
- Ghufron, A. (2017). *Desan dan Model Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: UNY Press.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konsep Pengembangannya*. Makalah yang disampaikan pada lokakarya penyusunan silabus prodi D-11 PGSD FIP.

Hamalik, O. (2004). *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan*. Jakarta: Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_. (2007). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Majid, A. (2005). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noe, R. (2010). *Employee Training and Development*. New York: McGraw-Hill Companies.

Saylor J.G. dan kawan-kawan. (1981). *Curriculum development and design (second edition)*. Sidney: Allen & Unwin.

Siregar, E. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*. JDM, Vol 11, Nomor 2, Hal 153-166.

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp/article/view/812>

### 2) Sumber Referensi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### 3) Sumber Referensi Peraturan Pemerintah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.